

KATA - PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat, Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Jajaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyelesaikan Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2015.

Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Tahun 2015 disusun sebagai bahan tindak lanjut Implementasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada kesempatan ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan dan penyelesaian Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2015. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan, oleh karenanya saran, kritik maupun masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Harapan kami semoga Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan semua Pihak, khususnya sebagai bahan Pelaksanaan Tugas dan Anggaran SKPD.

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. S. EKO PRABOWO, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590213 198903 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA SKPD	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	32
3.3 Program dan Kegiatan	33
3.4 Pagu Anggaran	36
BAB V PENUTUP	37
Lampiran - Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sehingga dalam pembangunan daerah benar-benar dapat maksimal memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, maupun berdaya saing dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya berusaha mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang ada, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Rencana Kerja SKPD Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ini disusun dengan mengacu Rancangan Awal RKPD, RENSTRA SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program, serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

1.1.1 Kondisi Umum

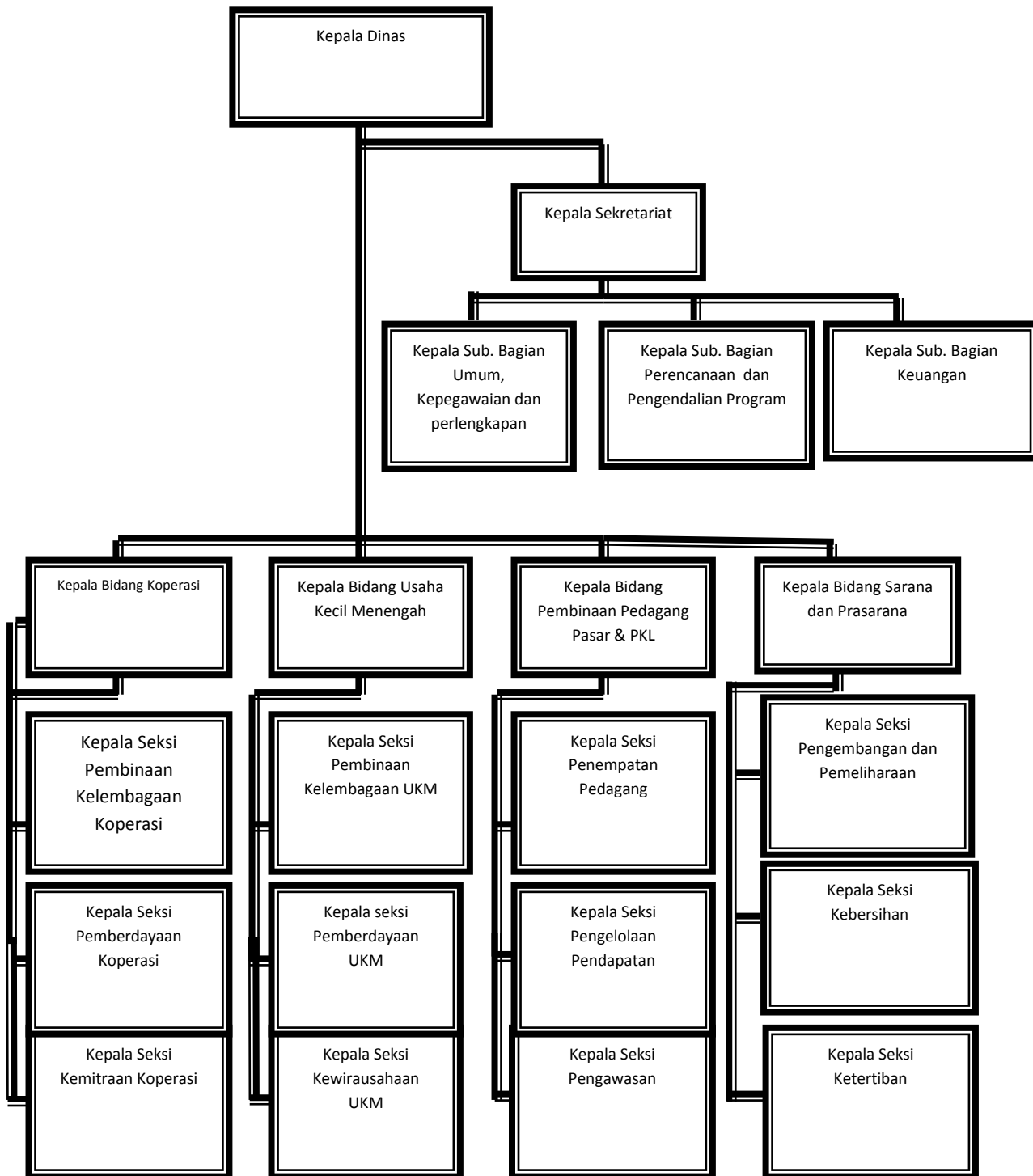
a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah dan Perda No. 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Bidang Koperasi, terdiri dari Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi, Seksi Pemberdayaan Koperasi, Seksi Kemitraan Koperasi.
4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari Seksi Pembinaan Kelembagaan UKM, Seksi Pemberdayaan UKM, Seksi Kewirausahaan UKM.
5. Bidang Pembinaan Pedagang Pasar dan PKL, terdiri dari Seksi Penempatan Pedagang, Seksi Pengelolaan Pendapatan, Seksi Pengawasan.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Pasar dan PKL, terbagi dalam Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Seksi Kebersihan, Seksi Ketertiban.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar



1.1.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai landasan pelaksanaan Tugas pokok, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2008 dengan penjabaran sebagai berikut :

Tugas Pokok : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar serta tugas pembantuan serta menyediakan Sarana dan Prasarana Pasar.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.
- b. Pembentukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar yang terdiri dalam kelompok bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.
- c. Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengendalian terhadap Koperasi, UMKM dan Pasar di wilayahnya.
- d. Melaksanakan Pendidikan / Pelatihan dan Sosialisasi pada Pengurus dan Anggota Koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
- e. Melaksanakan tugas umum dan ketatausahaan dibidang Koperasi , UMKM dan Pasar.
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1.1.3 Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Sebagai Penjabaran dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”**, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan pasar yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai penggerak ekonomi kerakyatan”.

b. Misi

Sebagai perwujudan dari visi yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan suatu misi yang jelas yang mampu dilaksanakan oleh segenap elemen yang berhubungan langsung dengan visi tersebut. Misi yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang pelaksanaan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi kerakyatan Daerah Kotawaringin Barat.
2. Meningkatkan Pembinaan, pengawasan pemantauan UMKM dan Pasar sebagai wadah ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan dan mengembangkan Koperasi, UMKM dan Pasar baik kualitas dan kuantitas kewirausahaan pedagang sebagai pelaku ekonomi dalam rangka sumberdaya produktif secara adil dan merata.
4. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Daerah baik Pasar Kabupaten, Kecamatan maupun Pasar Desa sebagai pusat Perdagangan.
5. Meningkatkan Ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar Daerah.

6. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar dalam peningkatan PAD.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
8. Meningkatkan pelayanan prima kepada Koperasi UMKM dan pasar secara bertanggung jawab.

1.1. 4 Strategi

1. Membangun dan mengembangkan sistem perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, kehutanan, industri, perdagangan dan jasa.
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah untuk mendukung pelayanan pedagang pasar dan PKL.
4. Memberikan peningkatan kemampuan SDM untuk berusaha.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)
7. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
8. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Tahun 2015 adalah mensinergikan dan memaksimalkan pengelolaan program dan kegiatan prioritas agar efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dan manfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengambil peran strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 adalah Menyediakan dokumen yang menjadi acuan resmi bagi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Intansi terkait dan masyarakat luas.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Pagu Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Sektor koperasi, UMKM dan Pasar mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu sektor-sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat. Oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi, UMKM dan Pasar harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi, UMKM dan Pasar dapat berjalan sesuai dengan Renstra Strategis (Renstra).

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor Koperasi, UMKM dan Pasar mempunyai peran yang signifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mendasarkan analisis di atas maka penting adanya evaluasi capaian kinerja dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro, selarasnya program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

2.1.1 Realisasi Pelaksanaan Urusan Koperasi, UMKM dan Pasar

Penyelenggaraan Urusan Koperasi, UMKM dan Pasar berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Peraturan Presiden (Pepres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 8 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Pasar, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera dengan berbasis pada Koperasi, UMKM dan Pasar.

Peran serta koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat signifikan, hal ini karena Koperasi, Usaha Mikro, kecil, menengah dan Pasar langsung menyentuh masyarakat akar rumput dengan berbasis pada potensi dan keunggulan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Pencapaian kegiatan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini :

a. Koperasi

Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan target 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 meningkat menjadi 89 unit dibandingkan Tahun 2012 yang berjumlah 84 unit atau bertambah sebesar 5 unit.
- 2) Peningkatan jumlah Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Koperasi dan Statusnya
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2012 – 2013

Koperasi	Tahun 2012 (unit)	Tahun 2013 (unit)	+ / (-)
Aktif	178	186	8
Tidak Aktif	50	50	-
Primer	228	236	8
KUD	25	25	-
Non KUD	203	211	8

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2013

- 3) Peningkatan secara umum penilaian KSP/USP di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Penilaian Kondisi KSP/USP
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2012 – 2013

Koperasi	Tahun 2012 (unit)	Tahun 2013 (unit)	+ /(-)
Sehat	4	8	4
Cukup Sehat	32	28	- 4
Kurang Sehat	18	22	4
Tidak Sehat	27	26	- 1
Jumlah	81	84	3

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2013

Tabel 2.3
Data Perkembangan Koperasi
Tahun 2012-2014 dan Target 2015

No	Uraian	Satuan	2012	Tahun 2013	Target Tahun 2014	Target Tahun 2015
1	Jumlah koperasi	Unit	228	236	250	265
2	Jumlah anggota	Orang	40.308	42.242	42.483	42.512
3	Jumlah modal sendiri	Rp.	124.759.690.190	64.518.922.042	71.521.902.604	75.621.205.304
5	Jumlah modal luar	Rp.	28.500.282.190	171.473.339.606	182.494.760.172	185.924.755.700
6	Volume usaha	Rp.	342.743.178.466	933.664.412.126	937.655.940.490	958.430.600.255
7	Jumlah SHU	Rp.	13.266.452.751	15.351.490.660	15.379.762.508	16.900.432.650
8	Jumlah asset	Rp.	153.259.972.380	235.992.261.648	254.016.662.776	265.215.450.600

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014

Dari data tersebut menunjukkan Jumlah Koperasi yang ada dari tahun ke tahun semakin bertambah. Tahun 2012 jumlah koperasi sebanyak 228 unit, sedangkan tahun 2013 bertambah menjadi 236 buah atau meningkat sebesar 3,38 %, kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi cukup tinggi, jumlah asset mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 153.259.972.380,- dan pada tahun 2013 naik menjadi Rp. 235.992.261.648,- atau mengalami kenaikan 35,05 %. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kekayaan yang semakin meningkat yang berarti membuktikan kepercayaan anggota maupun pihak luar yang semakin tinggi terhadap Koperasi. Jumlah volume usaha pada tahun 2012 sebesar Rp. 342.743.178.466,- yang meningkat menjadi Rp. 933.664.412.126,- pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan 63,29%. Begitu pula dengan jumlah anggota pada tahun 2012 sebesar 40.308 orang yang meningkat menjadi 42.242 orang pada tahun 2013 atau mengalami kenaikan 4,57 %.

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam` proses pembinaan selama ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian yaitu terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM, antara lain :

1. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM pada sumber-sumber informasi
2. Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses dan pangsa pasar
3. Kurangnya kemampuan dan akses UMKM dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi
4. Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan manajemen

5. Kurangnya kemampuan UMKM dalam menjalin kemitraan dan mengembangkan jaringan usaha.

Oleh karena itu pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Peningkatan jumlah dan jenis UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012 yang ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah dan Jenis UMKM
di Kabupaten Ktw. Barat Tahun 2012 – 2013

Jenis UMKM	Tahun 2012 (unit)	Tahun 2013 (unit)	+ / (-)
Aneka Jasa	1667	1695	28
Perdagangan	4532	4696	164
Industri, Pertanian, Non Pertanian	4365	4437	72
Jumlah	10.564	10.828	264

Sumber :Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, Kab. Ktw. Barat, Th. 2013

Dari data diatas dapat diketahui perkembangan UMKM, pada tahun 2012 sebesar 10.564 UMKM, pada tahun 2013 sebesar 10.828 UMKM yang tersebar dalam bidang aneka jasa, perdagangan, industri, pertanian, non pertanian.

c. Pasar

Perkembangan Pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya bergerak di sektor Konveksi, Sembako, Perkebunan, Perikanan, Pertanian pangan, hultikultura, Peternakan, dan Aneka Usaha. Jumlah

pasar pada tahun 2013 berjumlah 19 Pasar yang tersebar di 6 kecamatan dengan jumlah kios sebanyak 1.345 buah, 1322 bak, dan 473 plantaran.

Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional menghidupkan roda perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat langsung mulai dari pemasok barang, kuli angkut/panggul hingga penyedia jasa transportasi seperti tukang ojek.

d. Prestasi Penyelenggaraan Urusan

- 1) Koperasi Jasa "Primkopau Pura Iskandar" Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan, Peringkat I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Hari Koperasi Indonesia ke - 66.
- 2) Koperasi Produsen "KUD Usaha Mulya" Desa Medang Sari Kec. Arut Selatan Berprestasi Tingkat Nasional dalam rangka Hari Koperasi Indonesia ke – 66 dan Peringkat I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Hari Koperasi Indonesia ke – 66.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam "BMT UGT SIDOGIRI" Kelurahan Baru Kec. Arut Selatan, Peringkat I Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Hari Koperasi Indonesia ke – 66.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi, UMKM dan Pasar saat ini adalah:

Permasalahan

- 1) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi.

- 2) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) yang dikelola oleh koperasi masih sangat terbatas.
- 3) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan *entrepreneur mentality* yang masih kurang.
- 4) Banyak LKM atau Kelompok Pra Koperasi yang belum mengajukan Badan Hukum.
- 5) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.
- 6) Terbakarnya pasar indra sari.
- 7) Mulai berdirinya Mall dan pusat perbelanjaan modern.
- 8) Masih adanya tempat-tempat yang kotor dilingkungan Pasar Daerah.

Solusi

- 1) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.
- 2) Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan-kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen, usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum Koperasi.
- 3) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.

- 4) Melakukan pertemuan dan memfasilitasi pengawas, pengurus, anggota, dan pihak mitra kerja untuk dapat menyelesaikan permasalahan secara musyawarah.
- 5) Sosialisasi terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuai dengan salah satu Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.
- 6) Melakukan penjajakan dan Inventarisir daerah-daerah yang berkembang dan potensial untuk dibangun dan dikembangkan bangunan pasar
- 7) Membangun kembali pasar Indra Sari yang terbakar, yang dalam pembangunannya direncanakan juga akan melibatkan pihak swasta.
- 8) Berdirinya mall dan pusat perbelanjaan modern akan menjadi masalah yang mengancam bagi keberlangsungan pasar tradisional jika tidak diantisipasi baik oleh Pemerintah maupun pedagang itu sendiri. Oleh karena itu, arah pembangunan pasar dalam masterplan nya diarahkan pada pasar tradisional modern begitu juga para pedagang dibekali pengetahuan mengenai pola-pola,peraturan, dan tata niaga modern.
- 9) Menjadi langganan mendapat piala Adipura 6 kali berturut-turut menjadi motifasi bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk mendukung diraihnya Penghargaan Adipura Kencana. Kawasan pasar menjadi salah satu titik pantau Tim Adipura Kencana, sehingga terciptanya lingkungan pasar yang tetap bersih, rapi, dan nyaman akan terus diupayakan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada seperti Petugas kebersihan pasar, penyediaan peralatan kebersihan,

penyediaan tanaman-tanaman hijau baik pohon maupun berupa pot, serta himbauan persuasif kepada para pedagang pasar mengenai pentingnya kawasan pasar yang tertib, rapi, bersih, dan asri.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka setiap urusan dalam Pemerintahan harus memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Koperasi dan UMKM IKK yang ditampilkan adalah capaian kinerja untuk kesehatan Koperasi dengan rumus perbandingan antara jumlah Koperasi sehat dan jumlah seluruh Koperasi serta kuantitas Usaha Mikro Kecil dengan rumus jumlah Usaha Mikro Kecil dibandingkan jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD 2012-2016 maka telah ditetapkan beberapa indikator kinerja daerah urusan Koperasi dan UMKM yaitu; meningkatnya produktivitas, efisiensi, jumlah dan daya saing usaha kecil, rumah tangga, kecil/menengah dan Koperasi dengan beberapa indikator kinerja meliputi : Peningkatan jumlah UMKM, KUMKM yang melaksanakan kemitraan, Jumlah Koperasi, Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat, jumlah Koperasi aktif dan Peningkatan kuantitas modal KUMKM.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar
Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2011	Capaian Setiap Tahun		Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
			Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Fokus layanan Urusan Wajib							
10	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
10.1	Persentase koperasi aktif (%)	73,15	78,07	78,81	79,34	80,56	81,82	81,82
10.2	Jumlah BPR/LKM (unit)	23	23	23	23	23	23	23
10.3	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	10.136	10.564	10.828	11.228	11.628	12.028	12.028

2.2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan perkiraan Tahun 2014.

a. Pencapaian program Tahun 2013.

- Dana sebesar Rp. 729.297.350,00 untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 89,27%.
- Dana sebesar Rp. 323.764.100,00 Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 89,88 %.
- Dana sebesar Rp. 75.460.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 99,63%.
- Dana sebesar Rp. 18.000.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Program fasilitas pindah/purna tugas PNS dengan Tingkat Pencapaian 98,44%.
- Dana sebesar Rp. 31.125.700,00 diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 92,68 %.
- Dana sebesar Rp. 2.100.000,00 diperuntukan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 00,00%
- Dana sebesar Rp. 166.731.000,00 diperuntukan pada program penciptaan Iklim UKM yang kondusif dengan tingkat pencapaian 99,76%
- Dana sebesar Rp. 136.418.000,00 diperuntukan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 93,67 %

- Dana sebesar Rp. 18.100.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 85,09 %
- Dana sebesar Rp. 323.156.850,00 diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 68,83 %.
- Dana sebesar Rp. 1.985.680.000,00 diperuntukkan pada program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 91,43%
- Dana sebesar Rp. 204.603.000,00 diperuntukkan pada Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 99,22%.

b. Perkiraan Tahun 2014.

- Dana sebesar Rp. 1.001.245.310,00 diperuntukkan untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 100 %.
- Dana sebesar Rp. 623.531.950,00 diperuntukkan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
- Dana sebesar Rp. 98.680.000,00 diperuntukkan untuk kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
- Dana sebesar Rp. 55.019.040,00 diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
- Dana sebesar Rp. 2.321.450,00 diperuntukkan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 100 %

- Dana sebesar Rp. 58.545.000,00 diperuntukkan pada program penciptaan Iklim UKM yang kondusif dengan tingkat pencapaian 100 %
- Dana sebesar Rp. 127.411.250,00 diperuntukkan pada program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan tingkat pencapaian 100 %
- Dana sebesar Rp. 2.600.000,00 diperuntukkan pada program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan tingkat pencapaian 100 %
- Dana sebesar Rp. 214.306.000,00 diperuntukkan pada program kualitas kelembagaan koperasi dengan tingkat pencapaian 100%
- Dana sebesar Rp. 6.851.116.000,00 diperuntukkan pada program peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri dengan tingkat pencapaian 100 %
- Dana sebesar Rp. 212.236.000,00 diperuntukkan pada Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dengan Tingkat Pencapaian 100 %.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang mandiri tangguh dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka Koperasi, UMKM dan Pasar yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi perekonomian yang *propublic*.

Untuk itu ada beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Koperasi, UMKM dan Pasar antara lain :

- a) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi.
- b) Terbatasnya pengelolaan distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang agribisnis) oleh koperasi.
- c) Kurangnya kemampuan penguasaan teknologi dan ketersediaan sumber-sumber informasi UMKM, dalam rangka meningkatkan akses pasar, pengembangan manajemen dan peningkatan kualitas produk.
- d) Belum disahkannya Rencana tata ruang dan wilayah sehingga pengembangan pembangunan pasar kedepan belum terplatform dengan matang.
- e) Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern.

2.3.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

Peluang

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
- b. Tersedianya potensi usaha
- c. Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kabupaten Kotawaringin Barat
- d. Pangsa pasar yang semakin terbuka
- e. Terbukanya lapangan kerja
- f. Potensi produk – produk unggulan daerah yang sangat banyak
- g. Adanya peluang kemitraan dengan berdirinya perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan perkebunan

Tantangan

- a. Pengaruh globalisasi dan sistem ekonomi dunia yang cenderung liberal
- b. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Tingginya selektifitas produk yang digunakan
- d. Skill, kemampuan dan ketrampilan pelaku koperasi, umkm dan pedagang pasar daerah belum siap berkompetisi dalam mengantisipasi perdagangan bebas asean.

2.3.3 Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi.

Secara umum permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya Jumlah dan tingkat profesionalisme SDM Aparatur Koperasi, UMKM dan Pasar
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional
- c. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi
- d. Kurangnya Aksesibilitas Permodalan Koperasi dan UMKM
- e. Kurangnya inovasi produk
- f. Terdapatnya permasalahan antara pengurus, pengawas, anggota dan pihak ketiga (mitra kerja)
- g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM
- h. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib hukum dan tertib niaga yang masih rendah
- i. Sarana dan prasarana perdagangan yang belum tersebar secara merata
- j. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah
- k. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah
- l. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi
- m. Kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang kaki lima dan asongan yang strategis dan representatif
- n. Masih rendahnya tingkat kesadaran pedagang kaki lima dan asongan di bidang ketertiban, kebersihan dan retribusi

2.3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal, menghasilkan penemu kenalan sejumlah potensi kekuatan dan kelemahan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yang sangat mempengaruhi dalam mencapai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar. Untuk itu dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif *pro pure, progrowth* dan *pro job*
2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lebih terarah, massive dan optimal.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional dan ekspor.
5. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UMKM dalam menyikapi mega proyek (pelabuhan, bandara, pabrik, kawasan industri).
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum pusat maupun propinsi
7. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat
8. Optimalisasi Kembali fungsi Koperasi Unit desa
9. Peningkatan pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)
10. Realisasi OVOP (*One Village One Product*) keunggulan produk daerah
11. Regulasi yang kongkrit tentang pembubaran Koperasi di tingkat daerah
12. Adanya regulasi yang jelas dan keberpihakan pemerintah daerah untuk melindungi pedagang di pasar tradisional sehingga tidak tergerus oleh banyaknya pusat perbelanjaan modern.
13. Melakukan penyuluhan kepada pedagang pasar mengenai manajemen dan tata niaga modern.
14. Mengembangkan konsep pasar tradisional modern

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		Target dan Sasaran
			INDIKATOR	Kegiatan	
1	Program Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	- Adanya regulasi bagi pelaku umkm	- Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah	- 1 buah regulasi
			- Meningkatnya pemahaman pelaku UKM tentang kebijakan pemerintah yang menunjang usaha	- Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	- 60 UKM
			- Membantu Umkm dalam rangka mendapatkan legalitas usaha	- Fasilitasi kemudahan formalisasi badan UKM	- 5 UKM
			- Terwujudnya koordinasi dan pengembangan WUB	- Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	- 60 UKM
			- Meningkatnya kualitas sdm dan usaha UMKM	- Fasilitasi pengembangan UKM	- 40 UKM
			- Meningkatnya nilai tambah produk yang dihasilkan dengan bantuan stimulan	- Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM	- 2 UKM
			- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umkm baik faktor penunjang keberhasilan maupun faktor penunjang kegagalannya	- Monitoring Evaluasi dan pelaporan	- 6 Kecamatan
2		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	- Adanya sinergitas antara dunia usaha dengan UMKM	- Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	- 2 kegiatan
			- Meningkatnya kepemilikan HaKI Pelaku UMKM	- Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	- 4 UKM
			- Terlaksananya pasar ramadhan dan keikursertaan UMK pada pameran	- Fasilitasi Pengembangan sarana promosi Hasil produksi	- 60 UKM
			- Meningkatnya skill dan ketrampilan serta tumbuhnya semangat UMK untuk berusaha	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	- 3 Kegiatan

			- Para pelaku UMKM mengerti Pentingnya HAKI	- Sosialisasi HAKI kepada UMKM	- 3 Kegiatan			
3		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan dana bergulir dan kebijakan pembiayaan ke LPDB dan monitoring evaluasi dana bergulir	- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	- 5 Kecamatan			
4		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	- Meningkatnya pengetahuan pengurus dan pengawas Kop/ LKM tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pembukuan koperasi	- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	- 40 orang			
			- Pengurus koperasi/LKM mengerti tentang pembukuan		- 30 orang			
			- Meningkatnya pengetahuan Kop/LKM mengenai penyusunan profil koperasi		- 30 orang			
			- Meningkatnya pengetahuan pelaku Kop/LKM mengenai manajemen pengelolaan KSP/USP		- 30 orang			
			- Pembina/aparaturnya mengerti tentang akuntansi		- 7 orang			
			- Terlaksananya sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat/kelompok tani di desa PM2L	- Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	- 90 orang/3 desa PM2L			
			- Terlaksananya sosialisasi lembaga keuangan/pembiayaan bagi koperasi		- 20 orang			
			- Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	- Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	- 8 Koperasi			
- Terlaksananya rapat kemitraan koperasi	- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	- 4 kali rapat kemitraan/@20 org						

5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	- Ikut sertanya Koperasi/LKM dalam pameran/promosi dagang		- 4 kali pameran
		- Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP	- Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	- 20 koperasi
		- Mengikuti rapat pemberdayaan koperasi tingkat provinsi dan tingkat pusat		- 6 kali rapat koordinasi
		- Pengadaan buku administrasi dan organisasi koperasi		- 6 Kecamatan
		- Pembinaan pengelolaan usaha, administrasi pembukuan koperasi	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- 6 Kecamatan
		- Monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan usaha serta administrasi pembukuan koperasi		

6			- Terlaksananya pembangunan pasar di desa Mulya jadi Kec. Pangkalan banteng		- 1 paket
			- Terlaksananya pembangunan kios pasar di desa pangkalan tiga Kec. Pangkalan lada		- 1 paket
			- Terlaksananya pembangunan siring/pengaman pasar indra sari		- 1 paket
			- Terlaksananya sosialisasi dalam rangka relokasi pedagang pasar indra sari		- 1000 pedagang
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		- Terlaksananya pembentukan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	- Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	- 2 Kecamatan
			- Meningkatnya wawasan pedagang pasar dan PKL	- Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	- 4 Kecamatan
			- Terlaksananya pembayaran honorarium petugas pungut		- 6 orang
			- Terlaksananya penataan dan penempatan pedagang pasar	- Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	- 6 Kecamatan
			- Terlaksananya pendataan pedagang pasar		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2015, antara lain sebagai berikut :

No	Usulan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Cat
1	Pembangunan Pasar Desa	Desa Mulya Jadi Kec. Pangkalan banteng	Meningkatnya jumlah Kios/Los pasar dan jumlah pedagang pasar	1 paket	
2	Pembangunan Pasar Desa	Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan lada	Meningkatnya jumlah Kios/Los pasar dan jumlah pedagang pasar	1 paket	
3	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan	Desa Karang mulya Kec. Pangkalan banteng	Wawasan pedagang meningkat mengenai hak dan kewajibannya	40 orang	

Antusiasme masyarakat untuk mengusulkan kegiatan yang menjadi kebutuhan mereka sangat besar, hanya saja dari beberapa yang diusulkan tersebut ada yang belum memenuhi syarat evaluasi teknis dan terbatasnya pagu anggaran untuk tahun berjalan sehingga belum bisa diakomodir dalam Rencana kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Tahun 2015.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan Propinsi**

Pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan pasar berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi, UMKM, dan Pasar amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional. yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi, UMKM dan Pasar diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi, UMKM dan Pasar terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi, UMKM dan Pasar merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi, UMKM dan Pasar antara lain ;

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi, UMKM dan Pasar dalam perekonomian Nasional melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
 - c. Meningkatnya jumlah pasar dan jumlah pedagang pasar tradisional

2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.
5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
 - b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.
7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui:
 - a. Meningkatkan kuantitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
 - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM.
8. Program Revitalisasi pasar tradisional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan akses kualitas kelembagaan dan sumber daya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Meningkatkan akses perkuatan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Meningkatkan akses kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Meningkatkan kelancaran dan pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasar.
5. Meningkatkan kios, los, bak dan sarana prasarana lainnya baik pada pasar di ibu kota Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
6. Meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan pasar-pasar daerah sehingga memiliki nilai tambah.
7. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar dan lingkungannya.
8. Meningkatkan pembinaan dan pendataan pedagang pasar milik pemerintah.

9. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi untuk meningkatkan PAD.
10. Meningkatkan SDM Aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

3.2.2 Sasaran

1. Membina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar melalui pendekatan integral komprehensif di bidang Permodalan, Teknologi, Manajemen dan Pemasaran.
2. Memberi Fasilitas Permodalan dan bimbingan teknis bagi para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar untuk tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing di era pasar bebas.
3. Membina Kelembagaan yang lebih sehat dan mengarah kepada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Membentuk jaringan usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pengusaha besar secara adil dan transparan sehingga terbentuk pola kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan.
5. Meningkatkan penyediaan kios, los dan bak serta sarana dan prasarana penunjang pasar untuk memenuhi kebutuhan pedagang.
6. Melaksanakan pemeliharaan dan peremajaan pasar milik Pemerintah Kabupaten.
7. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar milik Pemerintah Kabupaten.
8. Akurasi dan pengembangan data pedagang pasar.
9. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan pasar.
10. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan SDM Aparatur melalui Diklat, kursus-kursus dan studi banding.
11. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
12. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan kesadaran pedagang melalui penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi.
13. Pengadaan sarana dan prasarana pasar.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
6. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
7. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
8. Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah.
9. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.
10. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri.
11. Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
5. Penyediaan jasa administrasi Keuangan.
6. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor
11. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
12. Penyediaan peralatan rumah tangga
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14. Penyediaan makanan dan minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
16. Pembangunan gedung/kantor
17. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
19. Pengadaan peralatan gedung kantor
20. Pengadaan meubleir
21. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
23. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
24. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25. Pengadaan pakaian kerja lapangan
26. Pendidikan dan pelatihan formal
27. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
28. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
29. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

30. Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah
31. Sosialisasi kebijakan tentang UKM
32. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah
33. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM
34. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
35. Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah
36. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
37. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
38. Peningkatan kerjasama dibidang HAKI
39. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
40. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
41. Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah
42. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM
43. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
44. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
45. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi
46. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi
47. Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi
48. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
49. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
50. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
51. Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
52. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
53. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

Program dan rencana kegiatan merupakan representasi dari gerak dan langkah SKPD dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Untuk penyusunan rencana pelaksanaan program maupun kegiatan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”** yang kemudian dijabarkan melalui Visi dan Misi Kepala Dinas serta tujuan dan sasaran kinerja.
- b. Pencapaian target kinerja dengan Indikator Kunci Kinerja (IKK) yaitu urusan Koperasi dan UMKM dengan capaian target yang telah ditentukan.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya optimalisasi pengembangan produk lokal yang menjadi ciri khas daerah dan merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mereduksi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- d. Peningkatan dan penguatan stabilitas ekonomi daerah tertinggal

3.4 Pagu Anggaran

Pagu Indikatif Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar pada Tahun 2015 di proyeksikan sebesar **Rp. 13.082.803.680,-** dengan uraian :

1. **Belanja Tidak Langsung Rp 3.835.791.680,-**
2. **Belanja Langsung Rp. 9.247.012.000,-**
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.176.737.985,-
 - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 1.248.617.515,-
 - Peningkatan disiplin aparatur Rp. 105.360.400,-
 - Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Rp. 127.662.109,-
 - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Rp. 2.662.000,-
 - Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Rp. 351.596.000,-
 - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Rp. 277.079.250,-
 - Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah. Rp. 24.200.000,-
 - Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Rp. 494.470.000,-
 - Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri Rp. 5.171.903.626.741,-
 - Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan Rp. 266.723.000,-

BAB IV**PENUTUP****4.1 Kesimpulan**

Pembinaan dan pengembangan KUMKM dan Pasar sangat kompleks karena jumlahnya yang besar dan tersebar di seluruh wilayah dengan tingkat kemajuan yang beraneka ragam dan dihadapkan pada masalah dalam berbagai aspek. Untuk mensukseskan pembinaan dan pengembangan perlu difokuskan pada jejaring kerjasama yang saling mendukung antar instansi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

KUMKM dan Pasar harus aktif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan usaha yang ada. Reorientasi pembinaan dengan pendekatan sosial ke arah prinsip bisnis dan kemandirian, lembaga-lembaga pembina baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat perlu meningkatkan profesionalisme dan kemandirian.

Dalam kenyataannya sektor KUMKM dan pasar memiliki banyak peluang untuk berkembang karena memiliki banyak potensi yang mendukung, baik dari sisi SDM, sumberdaya alam maupun produk-produk lokal yang memiliki daya saing dan juga keunggulan komparatif. Namun potensi tersebut belum dapat digali dan dipromosikan secara optimal serta belum difasilitasi secara maksimal oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan sarana-prasarana dan juga dana, serta belum didukung jiwa *entrepreneurship* masyarakat. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu antara lain melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan serta bantuan usaha.

Program pembinaan dan pengembangan KUMKM dan pasar ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016, yang berfungsi untuk memberikan gambaran kedepan tentang arah pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam periode satu tahun.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. Dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atas Renja dinas ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pangkalan Bun, Juli 2014

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. S. EKO PRABOWO, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590213 198903 1 002

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN
 SKPD : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SKPD

SKPD : 1.15.01 Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun (2015)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				1.147.345.250,00				
1	15	XX	15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif				351.596.000,00				
1	15	XX	15	1	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Adanya regulasi bagi pelaku umkm	Kec. Arut Selatan	1 buah regulasi	25.000.000	APBD Kabupaten		1 buah regulasi	27.500.000
1	15	XX	15	2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya pemahaman pelaku UKM tentang kebijakan pemerintah yang menunjang usaha	Kecamatan Pangkalan lada	60 UMKM	43.521.000	APBD Kabupaten		50 UMKM	47.873.100,00
1	15	XX	15	3	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Membantu Umkm dalam rangka mendapatkan legalitas usaha	Kec. Arut selatan	5 UMKM	15.000.000	APBD Kabupaten		5 UMKM	16.500.000
1	15	XX	15	6	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya koordinasi dan pengembangan WUB	Kotawaringin Barat	60 UMK	40.075.000	APBD Kabupaten		400 UMK	78.021.000,00

Rencana kerja dinas koperasi, umkm dan pasar | 2015

1	15	XX	15	8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas sdm dan usaha UMKM	Kotawaringin Barat	400 UKM	180.000.000	APBD Kabupaten		60 UKM	198.000.000
1	15	XX	15	9	Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya nilai tambah produk yang dihasilkan dengan bantuan stimulan	Kotawaringin Barat	2 ukm	30.000.000	APBD Kabupaten		3 unit	33.000.000
1	15	XX	15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umkm baik faktor penunjang keberhasilan maupun faktor penunjang kegagalannya	Kotawaringin Barat	6 kecamatan	18.000.000	APBD Kabupaten		6 kecamatan	19.800.000
1	15	XX	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				277.079.250,00				
1	15	XX	16	3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Adanya sinergitas antara dunia usaha dengan UMKM	Kotawaringin Barat	2 kegiatan	19.000.000	APBD Kabupaten			0
1	15	XX	16	4	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	Meningkatnya kepemilikan HaKI Pelaku UMKM	Kotawaringin Barat	4 UMKM	65.000.000	APBD Kabupaten			0
1	15	XX	16	5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Terlaksananya pasar ramadhan dan keikursertaan UMK pada pameran	Pangkalan Bun, Palangkaraya, Jakarta	60 UMK pasar ramadhan, 6 UMK pada pameran	92.209.250	APBD Kabupaten		64 UMK	157.665.000,00
1	15	XX	16	6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya skill dan ketrampilan serta tumbuhnya semangat UMK untuk berusaha	Desa PM2L di Kotawaringin Barat	3 keg	55.870.000	APBD Kabupaten		90 UMK	70.870.000,00
1	15	XX	16	8	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Para pelaku UMKM mengerti Pentingnya HAKI	Kecamatan Arut Selatan	60 orng	45.000.000	APBD Kabupaten			0
1	15	XX	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				24.200.000,00				
1	15	XX	17	5	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan dana bergulir dan kebijakan pembiayaan ke LPDB dan monitoring evaluasi dana bergulir	Kotawaringin Barat	39 Kop/LKM	24.200.000,00	APBD Kabupaten		37 Kop/LKM	35.000.000,00
1	15	XX	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				494.470.000,00				

Rencana kerja dinas koperasi, umkm dan pasar **2015**

1	15	XX	18	2	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Meningkatnya pengetahuan pengurus dan pengawas Kop/ LKM tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pembukuan koperasi, Meningkatnya pengetahuan mengenai penyusunan profil koperasi, manajemen pengelolaan KSP/USP, dan pembina/aparatur mengerti tentang akuntansi	Kec. Arut selatan	137 orang	170.000.000,00	APBD Kabupaten	40 Kop/LKM	158.000.000,00
1	15	XX	18	4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat/kelompok tani di desa PM2L dan Terlaksananya sosialisasi lembaga keuangan/pembiayaan bagi koperasi	Desa PM2L di Kabupaten Kotawaringin Barat	4 keg, 110 orang	65.710.000,00	APBD Kabupaten	90 orang	73.000.000,00
1	15	XX	18	5	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	6 Kecamatan	8 Koperasi	10.360.000,00	APBD Kabupaten	10 Kop	110.000.000,00
1	15	XX	18	6	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terlaksananya rapat kemitraan koperasi dan ikut sertanya Koperasi/LKM dalam pameran/promosi dagang	Kotawaringin Barat	4 kali rapat kemitraan koperasi, 4 kali pameran	122.000.000,00	APBD Kabupaten	8 Kop	80.000.000,00
1	15	XX	18	7	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP dan Mengikuti rapat pemberdayaan koperasi tingkat provinsi dan tingkat pusat	Kotawaringin Barat	6 kali rapat koordinasi, penilaian kesehatan KSP/USP 20 Koperasi	92.700.000,00	APBD Kabupaten	100 buku	55.000.000,00
1	15	XX	18	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan usaha serta administrasi pembukuan koperasi	Kotawaringin Barat	6 kecamatan	33.700.000,00	APBD Kabupaten	60 Kop/LKM	60.000.000,00
2	6				Perdagangan				5.438.626.741			
2	6	XX	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				5.171.903.741			

Rencana kerja dinas koperasi, umkm dan pasar | 2015

2	6	XX	18	1	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Adanya perangkat peraturan yang disempurnakan	Kotawaringin Barat	1 buah regulasi	24.000.000	APBD Kabupaten		1 buah regulasi	26.000.000
2	6	XX	18	3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya pembayaran honorarium satpam pasar daerah, terlaksananya pembayaran honorarium petugas kebersihan pasar daerah, tersedianya peralatan kebersihan, terlaksananya pemeliharaan pasar daerah, Pembangunan kios/los di desa sungai gudang, pembangunan pasar di desa mulya jadi, pembangunan kios pasar di desa pangkalan tiga, pembangunan siring pasar indra sari, relokasi pedagang indra sari	Kotawaringin Barat	7 paket pekerjaan, 12 bulan	5.147.903.741	APBD Kabupaten		Horarium satpam pasar daerah 12 bulan , Honorarium petugas kebersihan pasar 12 bulan, Pemeliharaan pasar daerah 1 tahun, dan pembangunan pasar daerah	2.763.124.600
2	6	XX	19		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan				266.723.000,00				
2	6	XX	19	1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Terbentuknya organisasi pedagang PKL dan Asongan	Kotawaringin barat	2 organisasi, Kec. Arsel dan Kec. P. Banteng	27.861.000	APBD Kabupaten			0
2	6	XX	19	2	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Meningkatnya wawasan pedagang pasar dan PKL dan pembayaran honorarium petugas pungut	Kec. Arut selatan, Kec. Kumai, Kec. P.Lada, Kec. Pangkalan Banteng	Honorarium 6 orang, Penyuluhan 4 kali	220.250.000,00	APBD Kabupaten		200 orang	255.175.000,00
2	6	XX	19	3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Terlaksananya penataan dan penempatan dan terlaksananya pendataan pedagang pedagang pasar	Kotawaringin Barat	750 kartu,6 Kecamatan	18.612.000,00	APBD Kabupaten		6 Kecamatan	33.140.000,00
X	XX				Umum				2.661.040.009,00				
X	XX	XX	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.176.737.985,00				
X	XX	XX	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat dan pengiriman paket	Kec. Arut selatan	200 lembar prangko,20 paket pengiriman	1.500.000,00	APBD Kabupaten		400 lembar prangko,40 paket pengiriman	3.513.840,00

Rencana kerja dinas koperasi, umkm dan pasar | 2015

X	XX	XX	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telpon, listrik kantor, listrik rumah dinas, listrik pasar, listrik pasar ramadhan, internet, air PDAM, dan surat kabar terbayar	Kec. Arut Selatan	12 bulan	175.145.920,00	APBD Kabupaten		12 bulan	176.160.512,00
X	XX	XX	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Premi asuransi terbayar	Kec. Arut selatan, Kec. Kumai, Kec. Kotawaringin lama	13 pasar daerah/tahun	174.870.576,00	APBD Kabupaten		14 pasar daerah/tahun	203.357.634,00
X	XX	XX	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan Pajak Kendaraan Operasional terbayar	Kec. Arut selatan	14 unit	8.500.000,00	APBD Kabupaten		14 unit	13.938.232,00
X	XX	XX	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium PNS, honorarium non PNS, dan administrasi keuangan terbayar	Kec. Arus selatan	12 bulan	170.706.500,00	APBD Kabupaten		12 bulan	109.309.706,00
X	XX	XX	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honorarium Non PNS terbayar, tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kec. Arut selatan	12 bulan	23.602.648,00	APBD Kabupaten		12 bulan	46.862.913,00
X	XX	XX	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Kec. Arut selatan	30 unit	45.336.620,00	APBD Kabupaten		8 unit	14.670.282,00
X	XX	XX	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor tersedia	Kec. Arut selatan	12 bulan	54.880.940,00	APBD Kabupaten		12 bulan	48.269.034,00
X	XX	XX	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya cetak, penggandaan, penjilidan	Kec. Arut selatan	12 bulan	42.947.068,00	APBD Kabupaten		12 bulan	30.741.774,00
X	XX	XX	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	Kec. Arut selatan	1 tahun	14.244.362,00	APBD Kabupaten		1 tahun	15.668.798,00
X	XX	XX	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Arut selatan	1 paket	73.117.263,00	APBD Kabupaten		1 paket	69.167.829,00
X	XX	XX	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec. Arut selatan	1 paket	20.710.370,00	APBD Kabupaten		1 paket	7.381.407,00
X	XX	XX	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk referensi	Kec. Arut selatan	17 buku	1.531.000,00	APBD Kabupaten		12 buku	1.464.100,00
X	XX	XX	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya bantuan uang minum tenaga kontrak, Makanan minuman rapat	Kec. Arut selatan	12 bulan	118.972.912,00	APBD Kabupaten		12 bulan	18.670.203,00

Rencana kerja dinas koperasi, umkm dan pasar | 2015

X	XX	XX	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Menyesuaikan	1 tahun	250.671.806,00	APBD Kabupaten		1 tahun	330.398.214,00
X	XX	XX	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				1.248.617.515,00				
X	XX	XX	2	3	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor	Kec. Arut selatan	1 paket	179.210.250,00	APBD Kabupaten		1 paket	77.231.275,00
X	XX	XX	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kec. Arut selatan	1 unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2	748.650.000,00	APBD Kabupaten			0
X	XX	XX	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. Arut selatan	1 paket	107.345.590,00	APBD Kabupaten			0
X	XX	XX	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Arut selatan	1 paket	27.353.775,00	APBD Kabupaten		1 paket	8.089.153,00
X	XX	XX	2	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Kec. Arut selatan	1 paket	20.972.000,00	APBD Kabupaten		1 paket	17.569.200,00
X	XX	XX	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Arut selatan	1 paket	34.648.000,00	APBD Kabupaten		1 paket	11.712.800,00
X	XX	XX	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya bahan bakar minyak dan penggantian suku cadang	Kec. Arut selatan	14 unit	120.437.900,00	APBD Kabupaten		14 unit	59.881.690,00
X	XX	XX	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. Arut selatan	12 unit	10.000.000,00	APBD Kabupaten		8 unit	8.000.000,00
X	XX	XX	2	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	-	-	-	APBD Kabupaten		-	0
X	XX	XX	3		Program peningkatan disiplin aparatur				105.360.400,00				
X	XX	XX	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kec. Arut selatan	56 stel	55.900.400,00	APBD Kabupaten		56 stel	59.890.440,00
X	XX	XX	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan tenaga kontrak	Kec. Arut selatan	77 stel	49.460.000,00	APBD Kabupaten		1 paket	1.756.920,00
X	XX	XX	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				127.662.109,00				

Rencana kerja dinas koperasi, umkm dan pasar | 2015

X	XX	XX	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatkan ketrampilan aparatur	Kec. Arut selatan	35 orang	55.000.000,00	APBD Kabupaten		40 orang	65.000.000,00
X	XX	XX	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kualitas sumberdaya aparatur meningkat	Menyesuaikan	12 orang	72.662.109,00	APBD Kabupaten		12 orang	41.428.320,00
X	XX	XX	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				2.662.000,00				
X	XX	XX	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya uang lembur pegawai dan penjiilidan	Kec. Arut selatan	4 orang,5 buku	1.331.000,00	APBD Kabupaten		4 orang,5 buku	1.464.100,00
X	XX	XX	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya uang lembur pegawai dan penjiilidan	Kec. Arut selatan	4 orang,5 buku	1.331.000,00	APBD Kabupaten		4 orang,5 buku	1.464.100,00
Jumlah									9.247.012.000,00				